

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. *Corporate Governance*.

Hastuti (2005) menjelaskan tentang isu munculnya *corporate governance* yaitu dikarenakan terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanam tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) merumuskan *corporate governance* sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*. *Corporate governance* yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Manfaat dari penerapan *corporate governance*

oleh investor. Penelitian ini menggunakan empat aspek *corporate governance* yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, dan ukuran komite audit.

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997 dalam Ujyantho dan Pramuka, 2007).

Sistem *corporate governance* memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh *return* atas investasinya dengan benar. *Corporate governance* juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan *sustainable* di sektor korporat. *Corporate governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan *stakeholder* internal dan eksternal

akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham (Agustina, 2006). Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Beiner *et al*, 2003 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004).

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan sebagai *stakeholder* perusahaan sebaik memonitor efektifitas

Fajar (2008) juga menjelaskan beberapa karakteristik yang harus dimiliki oleh dewan komisaris untuk dapat dikatakan sebagai suatu dewan yang efektif. Antara lain:

- 1) Mencerminkan adanya bauran yang seimbang dalam hal pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kemampuan.
- 2) Menerapkan proses dan praktik yang memungkinkan pembuatan keputusan yang patut dan bertanggung jawab.
- 3) Memerlihatkan adanya *esense of purpose* dan mengarahkan serta menuntun perusahaan dengan kepemimpinan yang kolektif.

b. Proporsi Dewan Komisaris Independen.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004).

Fama dan Jensen (1983) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Pada dasarnya semua komisaris bersifat independen, dalam pengertian mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara independen, semata-mata terlepas dari kepentingan perusahaan dan terlepas dari pengaruh pihak lain yang berbenturan dengan kepentingan perusahaan. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menciptakan lingkungan secara kondusif dapat memperkuat independensi komisaris antara lain dengan mempertegas kembali fungsi komisaris dan dengan memperkenalkan fungsi dan peran komisaris independen (Fajar, 2008).

Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk mencapai iklim yang lebih objektif dan independen, dan juga untuk menjaga *fireness* serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, termasuk kepentingan para *stakeholder* lainnya (Fajar, 2008).

Ketentuan tentang *outside director* (komisaris independen) menurut Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) kriteria minimum komisaris independen

independen dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, direksi, dan komisaris. Antonius dan Subarto (2003) dalam Fajar (2007) menyebutkan kriteria independensi yang meliputi: dipilih dan diangkat secara independen, penilaian secara objektif dan independen, berasal dari luar perusahaan, bebas dari pengaruh, tidak ada hubungan afiliasi, tidak memiliki kepentingan di perusahaan, bertindak secara independen, dan tidak memiliki kompetensi dan integritas yang memadai.

Berdasarkan kriteria tersebut pengertian komisaris independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi serta bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance (transparency, accountability, responsibility, fairness)*

c. Kepemilikan Manajerial.

Besar kecilnya jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Peningkatan kepemilikan manajerial digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan. Perusahaan meningkatkan kepemilikan

pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham (Kurniawan, 2008)

Shleifer dan Vishny (1986) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jansen dan Meckling, 1976 dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006). Sehingga permasalahan keagenen diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.

Boediono (2005) mengemukakan bahwa kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan. Menurut Morck et al. (1989) dalam Boediono

(2005) kepemilikan manajerial dan pemegang saham dapat

diselaraskan bila manajer memiliki saham perusahaan yang lebih besar.

Secara khusus kepemilikan manajer terhadap perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah *Insider Ownership* ini didefinisikan sebagai persentase suara yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan direksi suatu perusahaan (Mathiesen, 2004 dalam Rawi dan Muchlis, 2010).

Warfield *et al.*(1995) dalam Midiastuty dan Machfoedz (2003) menguji hubungan kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dari laba (*information content of earnings*) dan *discretionary accrual* dengan menggunakan data pasar modal Amerika. Mereka menemukan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan *earning management* dan berhubungan positif dengan kandungan informasi dari laba yang diproksi dengan *ERC*. Hasil ini diinterpretasikan sebagai indikasi bahwa relevansi dan reliabilitas laba merupakan fungsi positif dari kepemilikan manajerial.

d. Ukuran Komite Audit.

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen

BEI, SE- 008/BEI/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen. Dengan keberadaan komite audit yang memiliki tugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam hal penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Karakteristik komite audit lainnya yang mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen (*agen*) agar tidak merugikan pemilik perusahaan (*prinsipal*) adalah ukuran komite audit. Karena dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi *monitoring* pada komite audit terhadap pihak manajemen. Sehingga, (*prinsipal*) merasa bahwa kualitas pelaporan oleh manajemen terjamin (Putri, 2011).

Pierce dan Zahra (1992) dalam anggarini (2010) menyatakan dalam teori ketergantungan sumber daya berargumen bahwa terciptanya fungsi pengawasan komite audit yang efektif berhubungan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh komite. Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Oleh karena itu, diharapkan keberadaan komite audit yang efektif dapat mengubah kebijakan yang berbeda dalam pencapaian laba akuntansi pada beberapa tahun ke depan sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya permasalahan keuangan.

Siallagan dan Machfoedz (2006) yang menemukan bahwa dengan adanya komite audit dalam perusahaan maka *discretionary accruals* semakin rendah (*discretionary accruals* yang rendah maka kualitas laba tinggi). Adanya komite audit meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajer. Komite audit akan menghambat keleluasaan manajer dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga adanya *earning management* dapat ditekan. Dari hasil penelitian ini tampak bahwa semakin tinggi ukuran komite audit maka semakin rendah kemungkinan manajer dalam melakukan *earning management*.

Menurut KNKG, untuk membangun komite audit yang efektif,

Sedangkan menurut Carcello et al., (2008) dalam Rani (2011) rentang yang efektif adalah sebesar 6 – 9 orang, karena komite audit yang terlalu kecil akan mengalami kesulitan dalam pendistribusian kerja.

2. *Earning Management.*

Earnings management adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan khusus. Terdapat dua cara yang saling melengkapi dalam berfikir tentang *earning management*. Pertama, perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam kompensasi, kontrak, dan kos politik. Kedua, perspektif kontrak efisien ketika *earning management* dilakukan untuk menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kontrak (Kurniawan, 2008).

Timbulnya *earning manajemen* dapat dijelaskan dengan kategori keagenan (*agency theory*). Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik. Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan (Fajar, 2008). Boediyono (2005) menjelaskan dari sudut pandang teori akuntansi, *earning management* sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan.

management yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi *earning management*, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan *earning management*.

a. Pengertian *earning management*

Pengertian *earning management* menurut Melast (2005) dalam Fajar (2008) merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Sedangkan pengertian *earning management* menurut Wahlen (1999) dalam Dian (2005) menyatakan *earning management* tersebut terjadi bila manajer menggunakan kreativitasnya dalam penyusunan laporan keuangan dan mengatur transaksi untuk mengubah laporan dengan tujuan memberi kesan tertentu untuk mempengaruhi tindakan apabila *stakeholders* yang tergantung pada laporan keuangan tersebut.

b. Peluang *earning management*

Fajar (2008) mengemukakan kesempatan bagi manajemen untuk melakukan *earning management* timbul karena:

- 1) Kelemahan standar akuntansi.
- 2) Informasi asimetri antara manajer dengan pihak luar.

c. Bentuk-bentuk *earning management*

Scott (2003) dalam Dewi (2007) mengemukakan bentuk-bentuk *earning management* yang dilakukan oleh manajer, antara lain:

- 1) *Taking a bath*, dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari pada periode berjalan.
- 2) *Income minimation*, dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi agar tidak mendapat perhatian secara politis.
- 3) *Income maximation*, memaksimalkan laba agar memperoleh bonus yang besar.
- 4) *Income smoothing*, menaikkan atau menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan

.. .. .

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis

1. Ukuran Dewan Komisaris dan *Earning Management*

Dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance*. Penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beasley (1996), dan Jensen (1993) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran besar. Hal ini disebabkan ukuran dewan komisaris yang berukuran besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai alat monitoring kegiatan manajemen karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Salah satunya menyatakan bahwa semakin banyaknya personel yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat semakin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermarck, 1996, Eisenberg *et al*, 1998, dan Jensen, 1993 dalam Nasution dan Setiawan, 2007).

Penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *earning management*. Sedangkan Nasution dan Setiawan (2007) juga

menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap

Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Sehingga *earning management* yang terjadi semakin besar. Semakin besar jumlah dewan komisaris semakin meningkat perilaku *opportunistic* yang dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *earning management*.

2. Proporsi Dewan Komisaris Independen dan *Earning Management*

Dechow, dkk (1996) dalam Veronica dan Utama (2005) menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan manipulasi laba lebih besar kemungkinannya memiliki dewan komisaris yang mendominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinannya memiliki direksi utama yang merangkap menjadi komisaris utama. Chtourou dkk (2001) dalam Veronica dan Utama (2005) menemukan bahwa dewan komisaris yang independen akan membatasi aktivitas pengelolaan laba, sedangkan Perulian (2004) dalam Veronica dan Utama (2005) menunjukkan bahwa komisaris independen perusahaan-perusahaan di BEI tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi pengelolaan laba perusahaan.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *earning management*.

dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas (pengendali/*founders*) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun (Boediono, 2005).

Adanya sistem *corporate governance* diperusahaan, diyakini akan membatasi pengelolaan laba yang oportunistik, karena semakin tingginya kualitas audit, semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen dan adanya komite audit maka semakin kecil pengelolaan laba yang oportunistik.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *earning management*.

3. Kepemilikan Manajerial dan *Earning Management*

Dari sudut pandang teori akuntansi, *earning management* sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran *earning management* yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi *earning management*, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara

pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan *earning management* (Boediono, 2005).

Warfield *et al.*, (1995) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accruals* sebagai ukuran dari *eaning management* dan berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dalam laba. Hasil yang sama juga diperoleh Midiastuti dan Machfoeds (2003) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mampu meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan.

Gabrielsen *et al* (2002) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) menguji hubungan antara kepemilikan manajerial dan kandungan informasi laba serta *discretionary accrual*. Dengan menggunakan data pasar modal Denmark ditemukan adanya hubungan yang positif tetapi tidak signifikan antara kepemilikan manajerial dan *discretionary accrual* dan hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan kandungan informasi laba.

Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi kepemilikan menejerial maka semakin tinggi ukuran *discretionary accruals* yang dilaporkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap *earning management*.

4. Ukuran Komite Audit dan *Earning Management*

Karakteristik komite audit lainnya yang mendukung fungsi pengawasan terhadap manajemen (*agen*) agar tidak merugikan pemilik perusahaan (*prinsipal*) adalah ukuran komite audit. Karena dengan semakin besarnya ukuran komite audit akan meningkatkan fungsi *monitoring* pada komite audit terhadap pihak manajemen (Putri, 2011).

Penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) menemukan bahwa dengan adanya komite audit dalam perusahaan, *discretionary accruals* semakin rendah, yang berarti kualitas laba yang dihasilkan semakin tinggi. Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa dengan adanya komite audit akan memiliki konsekuensi pada laporan keuangan, yaitu : (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal.

Lin (2006) dalam Putri (2011) berhasil membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara ukuran komite audit dengan *earning management* (*discretionary accrual*). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin

terjamin. Sehingga besarnya ukuran komite audit dapat meminimalisasi terjadinya *earning management*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Ukuran Komite audit berpengaruh negatif terhadap *earning management*.

C. Model Penelitian

Corporate Governance

